



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Jalan Raya Sentani – Waena, Kel Waena, Kec. Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua 99332
www.ptun-jayapura.go.id, kesekretariatan@ptun-jayapura.go.id, kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id

Jayapura, 12 Desember 2024

Nomor : 1522/SEK.01/OT1.2/XII/2024

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Penyampaian Laporan Bulanan November 2024

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Di –

MANADO

Dengan Hormat,

Bersama Ini Kami Kirimkan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Bulan
November Tahun 2024

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA

MERNA CINTHIA, S.H., M.H

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2024**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	8
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	9
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	9
B. Tugas Pokok.	9
C. Fungsi.	9
D. Manajemen Kepaniteraan.	10
Struktur Organisasi.	10
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.	11
E. Manajemen Kesekretariatan	16
1. Struktur Organisasi.	16
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan.	17
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	32
A. Kesimpulan.	32
B. Rekomendasi.	32
LAMPIRAN	33
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	34
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	37
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01.	40
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05.	43
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	47

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	5
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	6
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	6
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	6
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	7
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	7
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	7
Tabel 8.	Laporan Keadaan Perkara Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 9.	Laporan Jenis Perkara Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 10.	Keadaan Keuangan Perkara Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 11.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 12.	Biaya Eksekusi s.d Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 13.	Buku Register Pelayanan Posbakum bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 14.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18
Tabel 15.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 16.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19

Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 18.	Realisasi Penerimaan PNPB Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 19.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 20.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 21.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	21
Tabel 22.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 23.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	25
Tabel 24.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	26
Tabel 25.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27
Tabel 26.	Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi Lainnya	28
Tabel 27.	Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	28
Tabel 28.	Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29
Tabel 29.	Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan November secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas

3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 351/KPTUN.W8-TUN3/SK.KP.I/III/2024 Tentang Penetapan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri

7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrauw	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009

8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – 2024
15	MERNA CINTHIA, S.H.,M.H	Periode 2024 – Sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem SIPACE yang dikembangkan oleh Pranata Komputer Tingkat Pertama. Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain :

Bab I. Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan

Bab II. Menguraikan pelaksanaan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada bulan berkenaan.

Bab III. Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

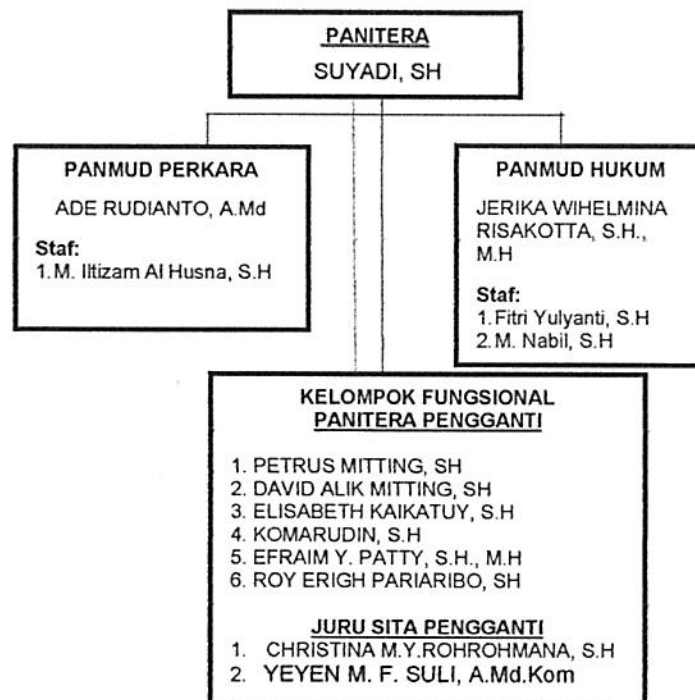
D. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Pada bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. Kepaniteraan Muda Perkara; Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan November Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan November Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Keadaan Perkara Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN	MASUK	PUTUS	SISA	KETERANGAN			
		LALU	BLN INI	BLN INI	SD BLN INI	CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	8	5	1	11	-	-	-	1
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan November Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Jenis Perkara Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	6	2	8
2	Kepegawaian	-	1	1
3	Perijinan	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	2	2	4
Total		8	5	13

1.3. Keadaan Keuangan Perkara Bulan November Tahun 2024

Tabel 10. Keadaan Keuangan Perkara Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	28,863,000	-	-	28,863,000
2	Penerimaan	-	13,057,000	-	13,057,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	625,000	625,000
4	Biaya Panggilan	-	-	214,000	214,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	224,000	224,000
6	Biaya Pemeriksaan setempat	-	-	7,500,000	7,500,000
7	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Berkas	-	-	210,000	210,000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	250,000	250,000
9	Materai	-	-	30,000	30,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	270,000	270,000
	b. Redaksi	-	-	30,000	30,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	625,000	625,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	3,432,000	3,432,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	28,863,000	13,057,000	13,410,000	28,510,000

1.4. Biaya proses/ATK/Pemberkasan s.d Bulan November Tahun 2024

Tabel 11. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	7,286,500	-	-	7,286,500
2	Penerimaan	-	625,000	-	625,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	-	-
	Jumlah	7,286,500	625,000	-	7,911,500

1.5. Biaya Eksekusi s.d Bulan November Tahun 2024

Tabel 12. Biaya Eksekusi s.d Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,325,000	-	-	1,325,000
2	Penerimaan	-	-	-	-
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	-	-
4	ATK Eksekusi	-	-	-	-
5	Materai	-	-	10,000	10,000
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
7	Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi	-	-	140,000	140,000
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
9	Surat Pemberitahuan kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,325,000	-	150,000	1,175,000

1.6. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.2.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan November Tahun 2024 adalah 69,23%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

b. Kepaniteraan Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

- e. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan November Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 126/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024 tentang Pembentukan Pengelolaan Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W8-TUN3/110/OT.01.3/I/2023 tentang Standar Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan. Untuk Bulan November 2024 tidak ada register di Meja Informasi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan Dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Bulan ini tidak terdapat Pengaduan yang terdaftar pada buku register Bulan November 2024.

2. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 13. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Daniel toto	Konsultasi hukum terkait pemilihan	1 Jam	-
2	Termis wesapla	Konsultasi hukum terkait mengenai pembatalan sertifikat terdahulu	1 Jam	-
3	Esaph yalak	Konsultasi hukum terkait sertifikat tanah	1 Jam	-
4	Bemandus iwong	Konsultasi hukum terkait pembatalan sertifikat tanah	1 Jam	-
5	Ortis nandotarai	Konsultasi hukum terkait gugatan DPRK	1 Jam	-
6	Gerson hommy	Konsultasi hukum terkait sengekta tanah	1 Jam	-
7	Henry sanyoto	Konsultasi hukum terkait jual beli rumah	1 Jam	-
8	Lamhot martua nababan	Konsultasi hukum terkait balik nama sertifikat	1 Jam	-

3. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

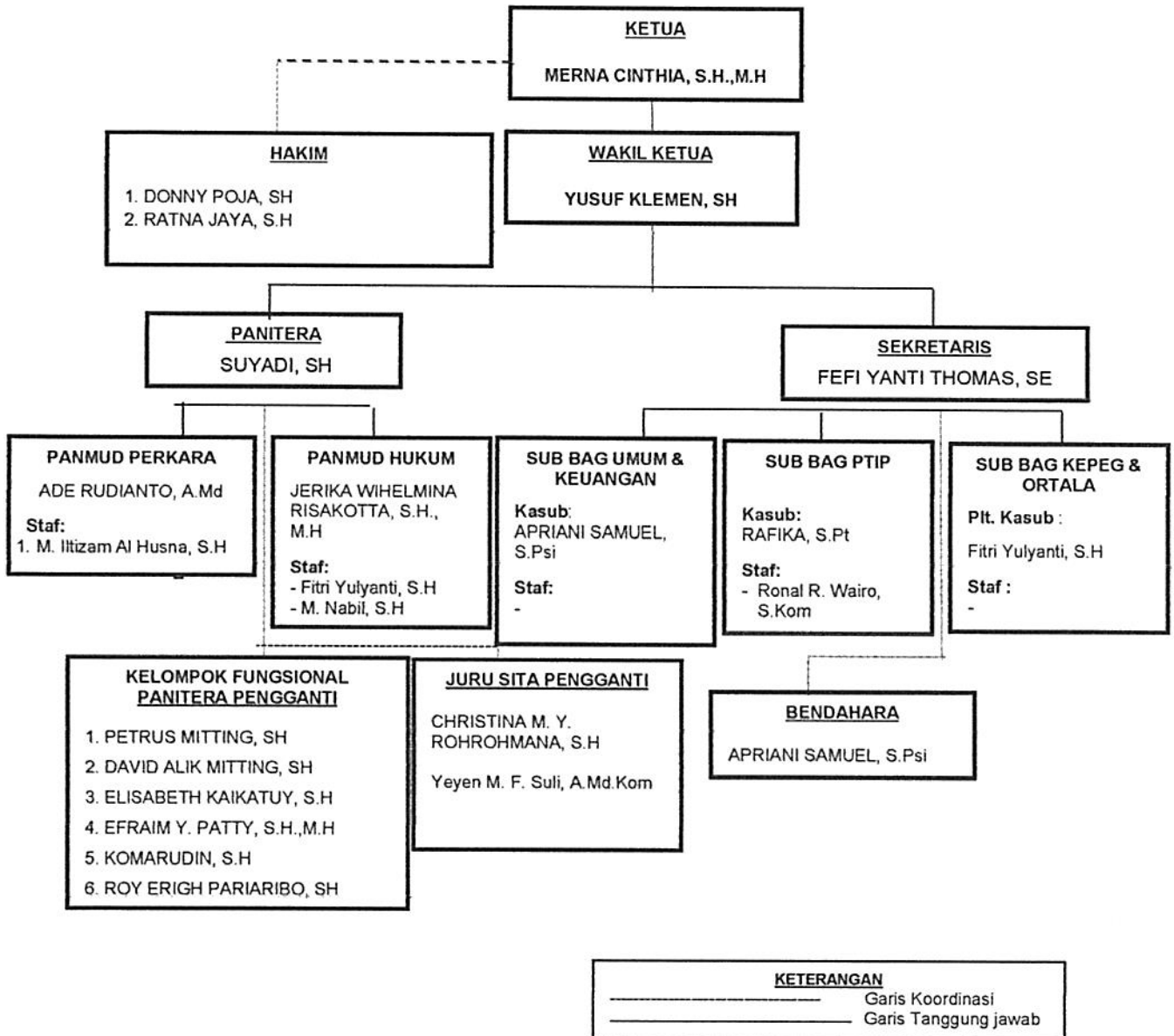
Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak. Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

E. Manajemen Kesekretariatan**1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan

Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
(Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan Oktober Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 01 PTUN Jayapura Tahun 2024 sampai dengan bulan November Tahun 2024.

Tabel 14. Pagu Anggaran DIPA 005.01 Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	3,805,122,000
Belanja Barang	1,901,332,000
Total	5,706,454,000

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 05 PTUN Jayapura Tahun 2024 sampai dengan bulan November Tahun 2024

Tabel 15. Pagu Anggaran DIPA 005.05 Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Pengamanan Sidang	20,500,000
Pos Bantuan Hukum	33,000,000
Prodeo	96,670,000
Total	150,680,000

a. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan November Tahun 2024

Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 16. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	3,797,872,000	307,213,981	3,465,883,943	331,988,057
2	Barang	1,901,332,000	135,850,480	1,720,784,457	178,777,543
3	Barang Non Operasional	7,250,000	-	7,250,000	-

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	150,680,000	5,400,000	144,803,240	5,876,760
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

b. Laporan PNB

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan Oktober Tahun 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Penerimaan PNB Bulan November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2,449,927	26,646,832
2	425232	Uang Meja (Leges)	230,000	1,880,000
3	425233	Ongkos Perkara	300,000	2,340,000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	897,500	8,110,000
		Total		38,976,832

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 2494 m2,

halaman gedung 2000 m2 dan pagar 222 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 19. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1993	700 m2	200 m2
2	B	1993		150 m2
3	C	1992	1100 m2	70 m2
4	C	1992		70 m2
5	C	1992		70 m2
6	C	1992		70 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M2	1659/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	-	-
2	B	700 M2	1660/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Merna Cinthia, S.H., M.H	Ketua
3	C	1100 M2	1661/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Ratna Jaya, S.H	Hakim
4	C	1100 M2	1662/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

**Tabel 21. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura**

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	N0.SK	PENGGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	KETUA	
2	Toyota Innova	2011	PA 1988 DZ	Baik	1664/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	YUSUF KLEMEN, SH	WAKIL KETUA	
3	Toyota Innova	2011	PA 1810 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	
4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	229/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/II/2024	APRIANI SAMUEL, S.Psi	KASUB UMUM & KEUANGAN	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4301 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
10	Honda	2008	DS 4518 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
12	Honda	2005	PA 4133 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	231/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/II/2024	FITRI YULYANTI, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	Pit. Kasub Kepegawaian dan ORTALA
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
16	Honda	2007	PA 4396 DZ	Baik	1678/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	ADE RUDIANTO. A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	
17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	1673/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 22. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-
3	Genset	1	-	-
4	Sedan	1	-	-
5	Mini Bus	3	-	1
6	Sepeda Motor	8	-	9
7	Kursi Roda	1	-	-
8	Cermin Besar	2	-	3
9	Rak-rak Kayu	14	1	1
10	Lemari Besi	3	-	7
11	Lemari Kayu	30	6	8
12	Brankas	2	-	-
13	CCTV	1	-	-
14	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11
15	Papan Pengumuman	-	1	-
16	White Board	1	-	1
17	LCD Projektor/Infocus	1	-	-
18	Alat Kantor Lainnya	1	-	3
19	Meja Kerja Kayu	57	14	50
20	Kursi Besi	29	4	44
21	Kursi Kayu	20	31	41
22	Sice	5	3	12
23	Bangku Panjang Kayu	20	7	7
24	Meja komputer	-	1	3
25	Meja resepsionis	-	1	-
26	Sketsel	2	-	-
27	Kursi Fiber Glass	23	33	14
28	Sofa	1	-	-
29	AC Split	21	-	15
30	Mixer	2	-	1

31	Televisi	3	-	6
32	Amplifire	2	1	-
33	Loudspeaker	6	-	8
34	Compact disk player	-	1	-
35	Tiang Bendera	4	1	1
36	Kaca Hias	1	-	1
37	Palu Sidang	2	-	1
38	Lambang Instansi	1	-	-
39	Handy Cam	1	-	-
40	Audio Mixing Console	1	-	-
41	Microphone/Wireless Mic	6	-	2
42	UPS	7	-	-
43	Microphone cable	11	-	-
44	Camera Conference	1	-	-
45	Kursi Dorong	1	-	-
46	Walker Polding	2	-	-
47	Komputer jaringan lainnya	3	-	-
48	PC	25	4	13
49	Laptop	8	-	-
50	Notebook	9	6	5
51	Printer	6	6	16
52	scanner	2	-	2
53	server	1	-	1
54	router	1	-	1
55	Rak server	1	-	-
56	Alat Tennis Meja	-	1	-
57	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-
58	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-
59	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-
60	Pagar permanen	1	-	-
61	Referensi	18	-	-

1) Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 893/SEK/SK/X/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk dan atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara. Berdasarkan Surat Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/1423/PL.01.02/XII/2021 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Barang Milik Negara Dengan Bukti Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan Diatas Rp. 100.000.000 per Unitnya pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KM.6/WKN.17/KNL.02/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung. Di mana memuat tentang persetujuan status penggunaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupa 11 (sebelas) unit tanah dan bangunan dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp. 22.475.280.544 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

2) Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Tidak ada pengalihan status Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Penghapusan Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat telah diproses lelang dan telah ada penetapan dari KPKNL Jayapura. Sementara penghapusan yang telah berjalan menunggu surat keputusan BUA MARI untuk selanjutnya

d. Tata Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 23. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode November Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	2	27
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	13	45
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	5	4
4	Kepaniteraan Perkara.	8	18
5	Kepaniteraan Hukum.	2	3

1) Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan November 2024 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

2) Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan

Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 23 Orang yang terdiri dari:

Tabel 24. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
2.	Wakil Ketua	Yusuf Klemen, SH	
3.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
4.	Hakim	Ratna Jaya, S.H	
5.	Panitera	Suyadi, S.H	
6.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
7.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
8.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
9.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
10.	Panitera Pengganti	Roy Erigh Pariaribo, S.H	
11.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
12.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
13.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
14.	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	
15.	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	
16.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
17.	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	
18.	Juru sita Pengganti	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
19.	Juru sita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
20.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
21.	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	Plt. Kasub Kepegawaian & Ortala
22.	CPNS	M. Iltizam Al Husna, S.H	Panmud Perkara
23.	CPNS	M. Nabil, S.H	Panmud Hukum

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/c
2	Wakil Ketua	Yusuf Klemen, SH	IV/b
3	Hakim	Ratna Jaya, S.H	IV/a
4	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
5	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
6	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
7	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
8	Panitera Muda Hukum	Jerika Whelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
9	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
10	Panitera Pengganti	Roy Erigh Pariaribo, S.H	III/d
11	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
12	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
13	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/d
14	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
15	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	III/b
16	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
17	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	III/b
18	Juru Sita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/b
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
20	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	III/c
21	Juru Sita Pengganti	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/d
22	CPNS	M. Iltizam Al Husna, S.H	III/a
23	CPNS	M. Nabil, S.H	III/a

1. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 26. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Komarudin, S.H	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana, S.H	Jurusita Pengganti	Petugas Meja I dan Bendahara Penerimaan
3	Apriani Samuel, S.Psi	Kasub Umum dan Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Tabel 27. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	: diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pengemudi
2.	Syane Ratag, S.E.	: diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitinjak, S.Kom.	: diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	: diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
5.	Rahmat, S.H.	: diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	: diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	: diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	: diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam
9.	Maikel P. kelyanin, S.T.	: diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti
10.	Hose Pondan Mangallo, S.E	: diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti

2. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan November mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

3. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan November mengikuti Bimbingan Teknis ataupun Pelatihan yang diadakan oleh pihak terkait.

Tabel 28. Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	JABATAN	NAMADIKLAT/BIMTEK	PELAKSANAAN
1	Donny Poja, S.H.	Hakim	Sosialisasi PERMA NO.1/2023 dan peningkatan kapasitas Hakim Lingkungan	Kepala badan strajak diklat kumdil Ma-RI
2	Christina M.Y. Rohrohmana, S.H.	Jurusita pengganti	Pelatihan jarak jauh bendahara penerimaan	Pusdiklat keuangan

4. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
2	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
3	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
4	Ratna Jaya, S.H	Lengkap	-
5	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
6	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
7	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
8	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
9	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
10	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
11	Roy Erigh Pariaribo, S.H	Lengkap	-
12	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
13	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
14	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
15	Komarudin, SH	Lengkap	-
16	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	Lengkap	-
17	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
18	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
19	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
20	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
21	Fitri Yulyanti, S.H	Lengkap	-
22	M. Iltizam Al Husna, S.H	Lengkap	-
23	M. Nabil, S.H	Lengkap	-

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan November Tahun 2024 dilakukan revisi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 kewenangan Eselon 1 dan revisi kewenangan kanwil DJPb. Revisi DIPA 05 Dirjen Badilmiltun dilakukan revisi kewenangan kanwil DJPb.

2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Tanggung jawab pengelolaan ada pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai SK Nomor 134/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024 tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Web admin diserahkan kepada Rafika, S.Pt selaku Kasubbag PTIP dan Ronald R. Wairo, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Pertama. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 300 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 200 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP, 50 Mbps untuk ruang sidang online dan 50 Mbps untuk ruang media center.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik ke depannya kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Perlu ditingkatkan juga pelatihan sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan lebih baik kedepannya.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang untuk kesekretariatan, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada pegawai pada bagian Kepegawaian Ortala dan Sub bagian yang lainnya tidak memiliki staf pelaksana.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya pembangunan pagar tahap kedua yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 12 Desember 2024

KETUA



MERNA CINTHIA, S.H., M.H

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI –

LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN NOVEMBER 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
NO. DIPAJ TGL DIPAJ : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPAJ TGL DIPAJ REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 18 MARET 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 23 APRIL 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-3 TANGGAL 07 JUNI 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-4 TANGGAL 11 JULI 2024 REVISI KE-5 TANGGAL 16 OKTOBER 2024 REVISI KE-6 TANGGAL 21 OKTOBER 2024

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
				5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4+9)	12=(11/4)	
1	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	4									13
	6986	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	6986.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL										
	6986.EBA.962	Layanan Umum										
	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan										
	A. 521219	Tes Urine bebas Narkoba (25 Orang x Rp 290.000)	7,250,000		100.00%	0	0.00%	7,250,000	100.00%	0	0.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003	7,250,000	7,250,000	100.00%	0	0.00%	7,250,000	100.00%	0	0.00%	
	6986.EBA.994	LAYANAN PERKANTORAN										
	001	Gaji dan Tunjangan										
	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,324,080,000	1,137,692,100	85.92%	95,452,720	7.21%	1,233,144,820	93.13%	90,935,180	6.87%	
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,000	14,869	64.65%	1,046	4.55%	15,915	69.20%	7,085	30.80%	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	90,564,000	77,176,280	85.22%	6,904,610	7.62%	84,080,890	92.84%	6,483,110	7.16%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	32,004,000	27,159,846	84.86%	2,458,202	7.68%	29,618,048	92.54%	2,385,952	7.46%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	32,760,000	28,080,000	85.71%	2,340,000	7.14%	30,420,000	92.86%	2,340,000	7.14%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,445,792,000	1,155,830,000	79.94%	124,010,000	8.58%	1,279,840,000	88.52%	165,952,000	11.48%	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	249,459,000	231,871,427	92.95%	21,662,843	8.68%	253,534,270	101.63%	-4,075,270	-1.63%	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	67,000,000	56,632,440	84.53%	4,924,560	7.35%	61,557,000	91.88%	5,443,000	8.12%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	187,310,000	148,353,000	79.20%	19,260,000	10.28%	167,613,000	89.48%	19,697,000	10.52%	
	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	198,000,000	164,940,000	83.30%	17,455,000	8.82%	182,395,000	92.12%	15,605,000	7.88%	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,480,000	10,920,000	87.50%	745,000	5.97%	11,665,000	93.47%	815,000	6.53%	
	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	158,400,000	120,000,000	75.76%	12,000,000	7.58%	132,000,000	83.33%	26,400,000	16.67%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001	3,797,872,000	3,158,669,962	83.17%	307,213,981	8.09%	3,465,883,943	91.26%	331,988,057	8.74%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
	A. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	586,223,000	444,919,278	75.90%	53,446,500	9.12%	498,365,778	85.01%	87,857,222	14.99%	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73,100,000	69,161,495	94.61%	1,519,000	2.08%	70,680,495	96.69%	2,419,505	3.31%	
	B. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Video Conference - Internet)	221,250,000	187,593,939	84.79%	16,480,170	7.45%	204,074,109	92.24%	17,175,891	7.76%	
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,160,000	5,803,700	71.12%	646,400	7.92%	6,450,100	79.05%	1,709,900	20.95%	
	522112	Belanja Lnggananan Telepon	4,620,000	3,586,803	77.64%	377,904	8.18%	3,964,707	85.82%	655,293	14.18%	
	522113	Belanja Langganan Air	1,128,000	448,000	39.72%	112,000	9.93%	560,000	49.65%	568,000	50.35%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	522141	Belanja Sewa (Web Hosting)	5,300,000	5,239,200	98.85%	0	0.00%	5,239,200	98.85%	60,800	1.15%	
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	506,700,000	497,713,503	98.23%	8,930,000	1.76%	506,643,503	99.99%	56,497	0.01%	
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56,713,000	56,700,000	99.98%	0	0.00%	56,700,000	99.98%	13,000	0.02%	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	214,932,000	139,540,429	64.92%	45,256,956	21.06%	184,797,385	85.98%	30,134,615	14.02%	
	D. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas)	34,152,000	34,000,000	99.55%	0	0.00%	34,000,000	99.55%	152,000	0.45%	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,712,000	41,206,000	72.66%	0	0.00%	41,206,000	72.66%	15,506,000	27.34%	
	H. 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130,572,000	100,791,630	77.19%	7,311,550	5.60%	108,103,180	82.79%	22,468,820	17.21%	
	I. 524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,770,000			1,770,000	100.00%					
		JUMLAH KEGIATAN 6986.EBA.962	1,901,332,000	1,586,703,977	83.45%	135,850,480	7.15%	1,720,784,457	90.50%	178,777,543	9.40%	
		JUMLAH KESELURUHAN	5,706,454,000	4,752,623,939	83.29%	443,064,461	7.76%	5,193,918,400	91.02%	510,765,600	8.95%	

Jumlah Anggaran	5,706,454,000	Percentase
Realisasi Anggaran	5,193,918,400	91.02%
Sisa Anggaran	512,535,600	8.98%

Jayapura, 04 Desember 2024
 Kepala Kuasa Pengguna Anggaran
 Pengadlan Tata Usaha Negara Jayapura



PEFYANTI THOMAS, SE.
 NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN NOVEMBER 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPAJ TGL DIPAJ : SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPAJ TGL DIPAJ REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539139/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 18 MARET 2024, SP DIPA- 005.01.2.539139/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 23 APRIL 2024, SP DIPA- 005.01.2.539139/2024 REVISI KE-3 TANGGAL 07 JUNI 2024, SP DIPA- 005.01.2.539139/2024 REVISI KE-4 TANGGAL 11 JULI 2024 REVISI KE-5 TANGGAL 16 OKTOBER 2024 REVISI KE-6 TANGGAL 21 OKTOBER 2024

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.AEA	Koordinasi										
I	1059.AEA.003	Dukungan Penyelesaian Perkara										
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang										
	A. 521211	- Konsumsi Pengamanan Sidang (25 Org x 16 Kali)	20,500,000	18,750,000	91.46%	1,750,000	8.54%	20,500,000	100.00%	0	0.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.AEA	20,500,000	18,750,000	91.46%	1,750,000	8.54%	20,500,000	100.00%	0	0.00%	
II	1059.BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara										
	A. 521114	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	360,000	9,000	2.50%	0	0.00%	9,000	2.50%	351,000	97.50%	
	A. 521211	- Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	150,000	120,000	80.00%	0	0.00%	120,000	80.00%	30,000	20.00%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/IMAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
		JUMLAH KEGIATAN 1059.BCA	510,000	129,000	25.29%	0	0.00%	129,000	25.29%	381,000	74.71%	
III	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521211	- Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4,200,000	2,950,000	70.24%	1,250,000	29.76%	4,200,000	100.00%	0	0.00%	
	A. 522131	- Belanja Jasa Konsultansi Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 bin)	28,800,000	21,600,000	75.00%	2,400,000	8.33%	24,000,000	83.33%	4,800,000	16.67%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.QBA	33,000,000	24,550,000	74.39%	3,650,000	11.06%	28,200,000	85.45%	4,800,000	14.55%	
IV	1059.QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Sidang di luar Gedung Pengadilan										
	A. 522191	- Belanja Jasa (Biaya uang kebersihan)	300,000	300,000	100.00%	0	0.00%	300,000	100.00%	0	0.00%	
	524111	- Tiket (5 Org x 2 Keg)	37,007,000	36,312,000	98.12%	0	0.00%	36,312,000	98.12%	695,000	1.88%	
		- Transportasi (5 Org x 1 PP x 2 Keg)	7,200,000	7,200,000	100.00%	0	0.00%	7,200,000	100.00%	0	0.00%	
		- Penginapan (5 Org x 2 Hari x 2 Keg)	25,823,000	25,822,240	100.00%	0	0.00%	25,822,240	100.00%	760	0.00%	
		- Uang Harian (5 Org x 3 Hari x 2 Keg)	26,340,000	26,340,000	100.00%	0	0.00%	26,340,000	100.00%	0	0.00%	
			96,670,000	95,974,240	99.28%	0	0.00%	95,974,240	99.28%	695,760	0.72%	
		JUMLAH KESELURUHAN	150,680,000	139,403,240	92.52%	5,400,000	3.58%	144,803,240	96.10%	5,876,760	3.90%	

Jumlah Anggaran	150,680,000	Percentage
Realisasi Anggaran	144,803,240	96.10%
Sisa Anggaran	5,876,760	3.90%

Jayapura, 04 Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



FEEFYANTI THOMAS, SE
NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNB

FORM 01A

TAHUN : 2024

BULAN : November

NOMOR / TANGGAL DIPA : [12.15, 31/1/2024] Christine: Yg 01 dan 05 [12.22, 31/1/2024] PTUN Pak. komar: SP DIPA-005.05.2.539139/2024 / 31-01-20

DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

PROVINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura

SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 0	Rp. 1.650.000	Rp. 230.000	Rp. 1.880.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 0	Rp. 2.040.000	Rp. 300.000	Rp. 2.340.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 0	Rp. 7.212.500	Rp. 897.500	Rp. 8.110.000
		JUMLAH I	Rp. 0	Rp. 10.902.500	Rp. 1.427.500	Rp. 12.330.000
		JUMLAH I s/d I	Rp. 0	Rp. 10.902.500	Rp. 1.427.500	Rp. 12.330.000

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



Fefi Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

Jayapura, 29 November 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNB

FORM 01

TAHUN : 2024
 BULAN : November
 NOMOR / TANGGAL DIPA : [12.15, 31/1/2024] Christine: Yg 01 dan 05 [12.22, 31/1/2024] PTUN Pak. komar: SP DIPA-005.05.2.539139/2024 / 31-01-2024
 DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan				
		- Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	188	10	Rp. 1.880.000	Rp. 1.880.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara				
		- Pendaftaran Gugatan/Permohonan	28	30	Rp. 840.000	Rp. 840.000
		- Pendaftaran Permohonan Banding	15	50	Rp. 750.000	Rp. 750.000
		- Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	1	200	Rp. 200.000	Rp. 200.000
		- Pendaftaran Permohonan Kasasi	11	50	Rp. 550.000	Rp. 550.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya				
		- Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	20	10	Rp. 200.000	Rp. 200.000
		- Permohonan Pengawasan Eksekusi	5	25	Rp. 125.000	Rp. 125.000
		- Surat Penyerahan Memori Banding	29	10	Rp. 290.000	Rp. 290.000
		- Redaksi Putusan/Penetapan	25	10	Rp. 250.000	Rp. 250.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pembanding	21	10	Rp. 210.000	Rp. 210.000
		- Surat Penyerahan Memori Kasasi	29	10	Rp. 290.000	Rp. 290.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	15	10	Rp. 150.000	Rp. 150.000
		- Surat Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	68	10	Rp. 680.000	Rp. 680.000
		- Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	3	10	Rp. 30.000	Rp. 30.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	34	10	Rp. 340.000	Rp. 340.000
		- Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	15	10	Rp. 150.000	Rp. 150.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Terbanding	25	10	Rp. 250.000	Rp. 250.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi	11	10	Rp. 110.000	Rp. 110.000

	- Pencabutan Gugatan/Permohonan	2	10	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon PK	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon Kasasi	13	10	Rp. 130.000	Rp. 130.000
	- Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	- Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	27	10	Rp. 270.000	Rp. 270.000
	- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	18	10	Rp. 180.000	Rp. 180.000
	- Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	11	10	Rp. 110.000	Rp. 110.000
	- Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon PK	8	10	Rp. 80.000	Rp. 80.000
	- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	6,07	500	Rp. 3.035.000	Rp. 3.035.000
	- Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	32	10	Rp. 320.000	Rp. 320.000
	- Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon	31	10	Rp. 310.000	Rp. 310.000
	- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	26	10	Rp. 260.000	Rp. 260.000
	- Surat Pemberitahuan Akta Kasasi	27	10	Rp. 270.000	Rp. 270.000
JUMLAH I				Rp. 12.330.000	Rp. 12.330.000
JUMLAH I s/d I				Rp. 12.330.000	Rp. 12.330.000

Jayapura, 29 November 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

[Signature]

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



[Signature]

Feli Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

LAMPIRAN 4
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05

TAHUN : 2024
BULAN : November
NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 / 24-11-2023
DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
PROVINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1		Pendapatan dari Pemindah tanganan BMN				
	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp. 0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	Rp. 3.000.000
		JUMLAH I	Rp. 0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	Rp. 3.000.000
2		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 0	Rp. 24.196.905	Rp. 2.449.927	Rp. 26.646.832
		JUMLAH II	Rp. 0	Rp. 24.196.905	Rp. 2.449.927	Rp. 26.646.832
		JUMLAH I s/d II	Rp. 0	Rp. 27.196.905	Rp. 2.449.927	Rp. 29.646.832

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Fefi Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

Jayapura, 29 November 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

TAHUN : 2024
BULAN : November
NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA-005.05.2.539139/2024 / 24-11-2023
DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
PROVINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan dari Pemindah tanganan BMN				
	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin				
		- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1	3.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
		JUMLAH I			Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
2		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan				
		- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	11	-	Rp. 26.646.832	Rp. 26.646.832
		JUMLAH II			Rp. 26.646.832	Rp. 26.646.832
		JUMLAH I s/d II			Rp. 29.646.832	Rp. 29.646.832

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jayapura, 29 November 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



Fefi Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

[Handwritten signature]

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

FORMULIR L1 - 11																			
NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PEMERIKSAAN	DISESAL			ACARA SINGKAT				ACARA BAKARAKARA CEPAT					SISA AKHIR			KETERANGAN	
			NAMA KETUA PANITERA	TANGGAL PENGALAN	TANGGAL PENETAPAN	TERIMA PERLUAN	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL PERKARA	TANGGAL PERKARA	TANGGAL PERKARA	TANGGAL PERKARA	TANGGAL PERKARA	TANGGAL PERKARA	TANGGAL PERKARA	TANGGAL PERKARA	TANGGAL PERKARA	TANGGAL PERKARA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	14/G/2024/PTUN JPR	19-07-2024									16-07-2024	B. C1. C1/05	24-07-2024	20-08-2024		14-09-2024			KETUA: MERNIA CINTIA S.H., M.H. WAKIL KETUA: YUSUP KLEVEN S.H. HAKIM HAKIM
2	16/G/2024/PTUN JPR	29-07-2024									26-07-2024	A. B. C2/01	14-08-2024	11-09-2024		16-09-2024			1. RATNA JAYA, S.H., M.H. 2. DORNY POJA, S.H.
3	18/G/2024/PTUN JPR	19-08-2024									18-08-2024	B. C1. C2/04	27-08-2024	06-09-2024		18-09-2024			
4	19/G/2024/PTUN JPR	21-08-2024									21-08-2024	A. C1. C2/07	28-08-2024	18-09-2024		18-09-2024			PANITERA/PENGADILAN
5	20/G/2024/PTUN JPR	21-08-2024									21-08-2024	B. C1. C2/08	01-10-2024	22-10-2024		18-09-2024			1. SUYADI, S.H. 2. ADE RUDANTO
6	22/G/2024/PTUN JPR	07-10-2024									07-10-2024	A. C1. C2/06	15-10-2024	31-10-2024	22-02-2024	20-03-2024			3. JERKA W. RISAKOTA S.H., M.H. 2. PETRUS MITING S.H.
7	23/G/2024/PTUN JPR	07-10-2024									07-10-2024	A. C1. C2/03	15-10-2024	26-10-2024		23-02-2024			5. DAVID ALK MITING S.H. 6. ELZAETH KAKATUY S.H. 7. EFRAM YOSEPH PATTY S.H., M.H.
8	24/G/2024/PTUN JPR	30-10-2024	AD	30-10-2024	11-11-2024										24-02-2024				8. KOMARUDIN, S.H. 9. ROY E. PARIARBO S.H.
9	24/G/2024/PTUN JPR	01-11-2024																	REKAPITULASI
10	26/G/2024/PTUN JPR	08-11-2024									01-11-2024	B. C1. C2/02	14-11-2024	28-11-2024		25-02-2024			1. Sisa BujarLau 8 2. Marnu BujarLau 5 3. Pura 1
11	27/G/2024/PTUN JPR	14-11-2024									06-11-2024	A. C1. C2/0	20-11-2024			26-02-2024			- Damisai 1 - Cabot
12	28/G/2024/PTUN JPR	22-11-2024									22-11-2024	B. C1. C2/06				26-02-2024			4. Sisa BujarLau 11 5. Belum di bagi
13	29/G/2024/PTUN JPR	25-11-2024									26-11-2024	B. C1. C2/07				26-02-2024			6. Belum di Putus 11 7. Dalam Minda

Mengetahui

KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

MERNIA CINTIA

Jayapura, 29 November 2024

Pth. PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

ADE RUBIANTO

LAPORAN JENIS PERKARA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

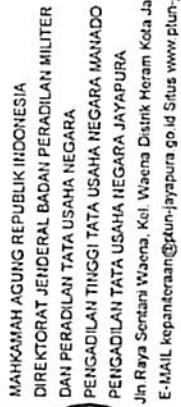
Formulir LI - T2																													
NO	JENIS PERKARA	SISA BULAN LALU			PERKARA			PENGUGAT		TERGUGAT		PERLAWANAN		PUTUSAN						SISA PERKARA BULAN IN			Permohonan			Terima Berkas			KET.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	2																												
A	GUGATAN																												
1	Pertanahan	6	2	-	8	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kepegawaian	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kopala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pergantian Antar Waktu (PAW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Merek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Lain - Lain	2	2	-	4	4	-	-	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
JUMLAH		8	5	-	13	13	-	-	13	1	-	-	-	-	-	1	-	1	11	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-

Jayapura, 29 November 2024

Mengeluhai :
KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
MERNIA CINTHIA

Pjh. PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

ADE RUMANTO



Formulir LI - T3

Mengetahui :

Jayapura, 29 November 2024

d/ Pih. PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

MERNA CINTYA

·ADE RUDTANTO



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln. Raya Sentani Waena, Kel. Waena Distrik Hieram Kota Jayapura Telp. (0967) 574160
E-MAIL: kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id Situs: www.ptun-jayapura.go.id

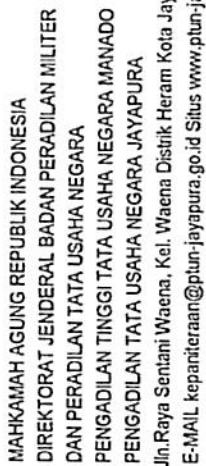
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN NOVEMBER 2024

Formulir U - T4						
NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	JASA	PEMBERI JASA	BANTUAN	KETERANGAN
1	-	01-11-2024	Daniel Toto	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEADILAN SEJATI, Tlp. 082199812386, Jln Raya Abe Pantai Enggros Belakang Kantor Lurah Wai Mhorock, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi hukum terkait pemilihan
2	-	04-11-2024	Termis Wesapia		Pemohon	konsultasi hukum mengenai pembatalan sertifikat terdahulu
3	-	08-11-2024	Esaph Yalak		Pemohon	Konsultasi hukum terkait sertifikat tanah
4	-	06-11-2024	Bernandus Iwong		Pemohon	Konsultasi hukum terkait pembatalan sertifikat tanah
5	-	11-11-2024	Ortis Nandolairai		Pemohon	Konsultasi hukum terkait gugatan DPRK
6	-	14-11-2024	Gerson Hommy		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Sengketa Tanah
7	-	19-11-2024	Hery Sanyoto		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Jual Beli Rumah
8	-	25-11-2024	Lamhot Martua Nababan		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Balik Nama Sertifikat

Jayapura, 23 November 2024

Mengetahui,
KETUA
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
MERNIA SINTHA

Pt. PANITERA
Pengadilan Tata Usaha Negara
ADE RUDANJO



Formulir L1-T5

[illegible]

Jayapura, 29 November 2024

Mengetahui :

MARKETUA,
Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura

Pt. PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

MERNA CINTHIA



LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form :LI-T6

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	28,863,000	-	-	28,863,000
2	Penerimaan	-	13,057,000	-	13,057,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	625,000	625,000
4	Biaya Panggilan	-	-	214,000	214,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	224,000	224,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	7,500,000	7,500,000
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	210,000	210,000
8	Biaya Pengiriman	-	-	250,000	250,000
9	Materai	-	-	30,000	30,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	270,000	270,000
	b. Redaksi	-	-	30,000	30,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	625,000	625,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	3,432,000	3,432,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	28,863,000	13,057,000	13,410,000	28,510,000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	7,286,500	-	-	7,286,500
2	Penerimaan	-	625,000	-	625,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	-	-
	Jumlah	7,286,500	625,000	-	7,911,500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,325,000	-	-	1,325,000
2	Penerimaan	-	-	-	-
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	-	-
4	ATK Eksekusi	-	-	-	-
5	Materai	-	-	10,000	10,000
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
7	Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi	-	-	140,000	140,000
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
9	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,325,000	-	150,000	1,175,000

Jayapura, 29 November 2024

MENGETAHUI :
KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

MERNA CINTHIA

Plh. PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

ADE RUDIAN TO



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln. RAYA SENTANI – WAENA – JAYAPURA
TELEPON/FAKSMILI (0967) 574160(PTSP) – 571216
E-MAIL kepanitera@ptun-jayapura.go.id SITUS www.ptun-jayapura.go.id

**BERITA ACARA PENUTUPAN KAS
BENDAHARA PERKARA**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan Pemeriksaan dan Penutupan Kas Bendahara Perkara dengan keadaan sebagai berikut :

Adapun hasil penutupan kas adalah sebagai berikut :

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A 1	Saldo Bulan Lalu	Rp	28.863.000	
2	Jumlah Penerimaan	Rp	13.057.000	
3	Jumlah Pengeluaran	Rp	13.410.000	
4	Saldo Pembukuan	Rp	28.510.000	
5	Saldo			Rp 28.510.000

II Saldo Menurut Kas , terdiri dari :

1	Uang Tunai	Rp	5.694.600	
2	Saldo Bank	Rp	22.815.400	
3	Surat Berharga	Rp	-	
4	Meterai	Rp	- (+)	
5	Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)			Rp 28.510.000

III Hasil Pemeriksaan Kas :

A Kas Perkara Yang di Kuasai Bendahara Perkara

1	Uang Tunai di Brankas			
Uang Kertas =	100.000 x 50 lbr	Rp	5.000.000	
	50.000 x 13 lbr	Rp	650.000	
	20.000 x 1 lbr	Rp	20.000	
	10.000 x 2 lbr	Rp	20.000	
	2.000 x 2 lbr	Rp	4.000	
Uang Logam	5.00 x 1 Keping	Rp	500	
	100 x 1 Keping	Rp	100	
Meterai	-	Rp	- (+)	
Jumlah				Rp 5.694.600

B Uang Kas Titipan Pihak Ketiga (Eksekusi) yang ada di Brankas

1 Uang Tunai di Brankas

Uang Kertas =	100.000 x 11 lbr	Rp	1.100.000	
	50.000 x 1 lbr	Rp	50.000	
	10.000 x 2 lbr	Rp	20.000	
	5.000 x 1 lbr	Rp	5.000	
Jumlah				Rp 1.175.000

Yang diperiksa
Kasir Perkara

KOMARUDIN, S.H.
NIP. 198305242012121002

Jayapura, 29 November 2024

Pemeriksa
Plh. Panitera

ADE RUDIANTO
NIP. 196706041994031012



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln. RAYA SENTANI – WAENA – JAYAPURA
TELEPON/FAKSMILI (0967) 574160(PTSP) – 571216
E-MAIL. kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id SITUS www.ptun-jayapura.go.id

LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form :LI-T8

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	28.863.000	-	-	28.863.000
2	Penerimaan		13.057.000	-	13.057.000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	625.000	625.000
4	Biaya Panggilan	-	-	214.000	214.000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	224.000	224.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	7.500.000	7.500.000
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	210.000	210.000
8	Biaya Pengiriman	-	-	250.000	250.000
9	Materai	-	-	30.000	30.000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	270.000	270.000
	b. Redaksi	-	-	30.000	30.000
	c. PNBP lain-lain	-	-	625.000	625.000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	3.432.000	3.432.000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	28.863.000	13.057.000	13.410.000	28.510.000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	7.286.500	-	-	7.286.500
2	Penerimaan		625.000	-	625.000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	-	-
	Jumlah	7.286.500	625.000	-	7.911.500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	1.325.000	-	-	1.325.000
2	Penerimaan	-	-	-	-
3	Pendaftaran Eksekusi			-	-
4	ATK Eksekusi			-	-
5	Materai	-	-	10.000	10.000
6	Biaya Surat Panggilan			-	-
7	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	140.000	140.000
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
9	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1.325.000	-	150.000	1.175.000

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Pih. PANITERA
ADE RUBIANTO
NIP. 196706041994031012

Jayapura, 29 November 2024

KASIR
KOMARUDIN, S.H.
NIP. 198305242012121002



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 1 dari 2
Page 1 of 2

Kepada Yth. / To :

Tanggal Laporan : 02/12/24
Statement Date

RPL 063 PDT PTUN JAYAPURA UTK BIAYA PERK

Periode Transaksi : 01/11/24 - 30/11/24
Transaction Period

JALAN RAYA SENTANI WAENA
RL.001/001,RL.001/001,KOTA JAYAPURA HERAM
KOTA JAYAPURA

No. Rekening : 214201000003307
Account No

Unit Kerja : KCP WAENA
Business Unit

Nama Produk : Giro Tres.NotP
Product Name

Alamat Unit Kerja : WAENA
Business Unit Address JAYAPURA

Valuta : IDR
Currency

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
01/11/24 06:34:11	BFVA19845493241100003 RIKOPOTAN:BMRIIDJA 20241101BMRIIDJA01000223389924 ESB:BFST:0008N:2024110199080611	8888686	0.00	10,000.00	19,768,400.00
01/11/24 07:01:20	BFVA19845493241100002 KEPALA KA:BMRIIDJA 20241101BMRIIDJA01000227821019 ESB:BFST:0008N:2024110101799544	8888691	0.00	39,500.00	19,807,900.00
01/11/24 07:08:37	BFVA19845493241100005 RIKOPOTAN:BMRIIDJA 20241101BMRIIDJA01000223420771 ESB:BFST:0008N:2024110102711021	8888659	0.00	39,500.00	19,847,400.00
04/11/24 11:11:27	BFST214201000003307THOMAS PEMBW:BMRIIDJA 20241104BMRIIDJA01000221920370 ESB:BFST:0008N:20241104FASTIDJA01030716515	8888614	0.00	2,500,000.00	22,347,400.00
06/11/24 10:42:01	ATMLTRPRM 00039876319845493241100007 TRF PRIMA FROM	0888024	0.00	865,000.00	23,212,400.00
06/11/24 17:05:27	5260512029308564#000000936611#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM TAMARA BELLA PUT LA 214201000003307ATM 5260512029308564	0888184	0.00	15,000.00	23,227,400.00
08/11/24 08:49:03	BFST214201000003307AGUSTINUS :BMRIIDJA 20241108BMRIIDJA01000221080015 ESB:BFST:0008N:20241108FASTIDJA01058092126	8888621	0.00	5,000,000.00	28,227,400.00
11/11/24 12:00:13	ESB:INDS:0002A00W:68a3fd53fba8	4920051	10,000,000.00	0.00	18,227,400.00
11/11/24 15:13:06	BFVA19845493241100008 RIKOPOTAN:BMRIIDJA 20241111BMRIIDJA01000228599613 ESB:BFST:0008N:20241111178214368	8888687	0.00	520,000.00	18,747,400.00
13/11/24 09:59:56	BFVA19845493241100010 LOTH KUNE:BMRIIDJA 20241113BMRIIDJA01000225263383 ESB:BFST:0008N:2024111392180994	8888644	0.00	865,000.00	19,612,400.00
21/11/24 09:50:38	BRIVA19845493241100013NBMBYULIUS DOMINGG BRIVA 19845493241100013NBMBYULIUS DOMING ESB:NBMB:0200200P:764097959292	8888507	0.00	865,000.00	20,477,400.00

Created By BRISIM
12/02/2024 06:15:16 AM



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
21/11/24 19:41:33	BFVA19845493241100014 HABEL RUM:BMRIIDJA 20241121BMRIIDJA01000227826662 ESB:BFST:0008N:2024112111032120	8888676	0.00	28,000.00	20,505,400.00
22/11/24 09:39:38	BFVA19845493241100015 HASNIAH S:BMRIIDJA 20241122BMRIIDJA01000223840104 ESB:BFST:0008N:2024112258597297	8888617	0.00	10,000.00	20,515,400.00
22/11/24 12:04:19	BRIVA19845493241100016NBMBMAJELIS RAKYAT BRIVA 19845493241100016NBMBMAJELIS RAKYA ESB:NBMB:0200200P:764583693239	8888284	0.00	28,000.00	20,543,400.00
22/11/24 13:35:21	NBMB SISRI NOVERIA TO RPL 063 PDT PTUN ESB:NBMB:0001500F:764620112801	8888274	0.00	14,500.00	20,557,900.00
25/11/24 09:43:11	ATMLTRPRM 00047696519845493241100017 TRF PRIMA FROM	0888047	0.00	865,000.00	21,422,900.00
25/11/24 16:10:18	ATMLTRPRM 00072948719845493241100018 TRF PRIMA FROM	0888012	0.00	16,500.00	21,439,400.00
26/11/24 09:13:44	BFVA19845493241100019 HABEL RUM:BMRIIDJA 20241126BMRIIDJA0100022597351 ESB:BFST:0008N:2024112659449666	8888634	0.00	470,000.00	21,909,400.00
28/11/24 13:12:18	BFVA19845493241100022 YULIYANTO:BNINIDJA 20241128BNINIDJA01000240364210 ESB:BFST:0008N:2024112839151715	8888696	0.00	873,000.00	22,782,400.00
28/11/24 15:24:17	BRIVA19845493241100023NBMBPENJABAT PJ GU BRIVA 19845493241100023NBMBPENJABAT PJ G ESB:NBMB:0200200P:767132732098	8888327	0.00	16,500.00	22,798,900.00
28/11/24 15:30:07	BRIVA19845493241100021NBMBMENTERI DALAM BRIVA 19845493241100021NBMBMENTERI DALAM ESB:NBMB:0200200P:767135218399	8888455	0.00	16,500.00	22,815,400.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
19,758,400.00	10,000,000.00	13,057,000.00	22,815,400.00

Terbilang / In Words

DUA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS LIMA BELAS RIBU EMPAT RATUS RUPIAH
TWENTY TWO MILLION EIGHT HUNDRED FIFTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank.
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

Created By BRISIM
12/02/2024 06:15:16 AM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN POSBAKUM
BULAN NOVEMBER 2024

SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 22 APRIL 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 12 JULI 2024

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
III	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521211	- Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4,200,000	2,950,000	70.24%	1,250,000	29.76%	4,200,000	100.00%	0	0.00%	
	A. 522131	- Belanja Jasa Konsultan Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 bin)	28,800,000	21,600,000	75.00%	2,400,000	8.33%	24,000,000	83.33%	4,800,000	16.67%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.QBA	33,000,000	24,550,000	74.39%	3,650,000	11.06%	28,200,000	85.45%	4,800,000	14.55%	

Jumlah Anggaran	33,000,000	Percentage
Realisasi Anggaran	28,200,000	85.45%
Sisa Anggaran	4,800,000	14.55%

